



PENCATATAN SURAT PERINTAH KERJA DALAM MANAJEMEN PENGELOLAAN LAHAN DI DISTRIK RASAU KUNING

Gabriela Marie Curie Simanjuntak^{1*}, Sri Widayanti²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

*E-mail: gabriela.mariecurie.s@gmail.com ; sriwidayanti@upnjatim.ac.id

ABSTRAK

Pencatatan Surat Perintah Kerja (SPK) dalam Manajemen Pengelolaan Lahan adalah suatu proses yang penting untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan yang efektif dan efisien. SPK adalah dokumen yang memuat keterangan terkait pemberian instruksi/perintah kepada pihak-pihak tertentu, berhubungan dengan pemberian tugas atau pengerjaan proyek khusus yang berkaitan dengan aktivitas di suatu perusahaan. Dalam jurnal ini, kita akan membahas tentang definisi, tujuan, dan implikasinya terhadap pelaksanaan pekerjaan. Dengan demikian, jurnal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan spesifik tentang Pencatatan Surat Perintah Kerja dalam Manajemen Pengelolaan Lahan khususnya di wilayah distrik Rasau Kuning, serta memberikan referensi yang berguna bagi para profesional yang berkepentingan dengan pengelolaan lahan yang efektif dan efisien. Adapun tahapan yang dilakukan adalah Persetujuan Perintah Kegiatan, Penginputan Data ke dalam aplikasi SAP dan Penerbitan Surat Perintah Kerja. Pengelolaan lahan dapat dilaksanakan jika Surat Perintah Kerja sudah terbit.

Kata kunci: Manajemen Pengelolaan Lahan, Surat Perintah Kerja

RECORDING OF WORK ORDERS IN LAND MANAGEMENT IN RASAU KUNING DISTRICT

ABSTRACT

Recording of Work Orders (SPK) in Land Management Management is an important process to ensure effective and efficient work implementation. SPK is a document containing information related to the provision of instructions/orders to certain parties, related to the assignment of tasks or the implementation of special projects related to activities in a company. In this journal, we will discuss the definition, objectives, and implications for the implementation of work. Thus, this journal aims to provide a clear and specific picture of Recording of Work Orders in Land Management Management, especially in the Rasau Kuning district, as well as to provide useful references for professionals who are interested in effective and efficient land management. The stages carried out are Approval of Activity Orders, Inputting Data into the SAP application and Issuance of Work Orders. Land management can be carried out if the Work Order has been issued.

Keywords: Land Management, Work Order

PENDAHULUAN

Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikan pengelolaan lahan berkelanjutan (SLM) sebagai “penggunaan sumber daya lahan, termasuk tanah, air, hewan dan tumbuhan, untuk produksi barang guna memenuhi perubahan kebutuhan manusia, sekaligus memastikan potensi produktif jangka panjang dari sumber daya tersebut. dan terpeliharanya fungsi lingkungan hidup”. Wardiman (2024) mendefinisikan manajemen pengelolaan lahan sebagai pengadopsian sistem penggunaan lahan yang melalui praktik pengelolaan yang tepat memungkinkan pengguna lahan untuk memaksimalkan manfaat ekonomi dan sosial dari lahan sambil mempertahankan atau meningkatkan fungsi dukungan ekologis dari sumber daya lahan.

Produktivitas dan keberlanjutan sistem penggunaan lahan ditentukan oleh interaksi antara sumber daya lahan, iklim, dan aktivitas manusia. Terutama dalam menghadapi perubahan dan variabilitas iklim, pemilihan penggunaan lahan yang tepat untuk kondisi biofisik dan sosio-ekonomi tertentu, dan penerapan manajemen pengelolaan lahan, sangat penting untuk meminimalkan degradasi lahan, merehabilitasi lahan terdegradasi, memastikan penggunaan sumber daya lahan secara berkelanjutan (yaitu tanah, air dan keanekaragaman hayati) dan memaksimalkan ketahanan. Dalam manajemen pengelolaan lahan dibutuhkan penggerakan perintah untuk melaksanakannya, salah satunya seperti Surat Perintah Kerja.



Kemajuan dalam teknologi berbasis web juga telah mendorong inovasi di berbagai bidang. Teknologi berbasis web telah mengubah cara kita berinteraksi yang mendasari pendekatan pemanfaatan kecerdasan dalam bidang informatika, penggunaan Internet of Things (IoT), serta jaringan komputer (Said & Salem, 2019), serta dalam bekerja dan hidup secara keseluruhan, termasuk sistem surat perintah kerja yang merupakan salah satu sistem penting dalam pengelolaan suatu perusahaan atau organisasi. Surat adalah alat untuk mengkomunikasikan pesan secara tertulis kepada pihak lain, surat dapat dibuat dengan cara atas nama sendiri atau atas nama orang lain, atau kapasitas jabatannya dalam sebuah organisasi yang terstruktur (Munawir & Hajriyanto, 2021).

Surat perintah kerja merupakan amanat atau tugas instruksi yang diberikan oleh atasan kepada bawahan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Surat perintah kerja biasanya berisi informasi mengenai jenis pekerjaan yang harus dilakukan, waktu pelaksanaan, dan informasi lain yang diperlukan (Dedi et al., 2020). Dalam keseluruhan konteks, perkembangan teknologi berbasis web telah meresapi berbagai aspek kehidupan, termasuk efisiensi dalam mengelola organisasi. Ini menggambarkan bagaimana transformasi teknologi telah membawa perubahan positif dalam tata cara kita mengoperasikan organisasi dan beradaptasi dengan dunia yang semakin terkoneksi. Saat ini surat perintah kerja masih dibuat dengan menggunakan program *SAP* dan jarang terjadi kesalahan pengetikan. Dengan demikian, surat perintah kerja sangat berperan penting untuk menjalankan manajemen pengelolaan lahan agar sesuai dengan kriteria dan indikator pelaksanaan.

Tinjauan Pustaka

1. Manajemen Pengolahan Lahan

Pengolahan tanah adalah manipulasi mekanik terhadap tanah untuk menciptakan keadaan tanah yang baik bagi pertumbuhan tanaman. Tujuan pokok pengolahan tanah adalah untuk menyiapkan tempat tumbuh bagi bibit, menciptakan daerah perakaran yang baik, membenamkan sisa-sisa tanaman dan memberantas gulma, setiap upaya pengolahan tanah akan menyebabkan terjadinya perubahan sifat sifat tanah, tingkat perubahan yang terjadi sangat ditentukan oleh jenis alat pengolahan tanah yang digunakan (Fahmudin dan Widiyanto, 2004).

Pengolahan tanah dilakukan untuk menciptakan kondisi lingkungan yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman. Namun pada kenyataannya pengolahan tanah yang dilakukan secara terus menerus ternyata menimbulkan dampak negatif terhadap produktivitas lahan. LIPTAN (1995) menyatakan bahwa disamping mempercepat kerusakan sumber daya tanah seperti meningkatkan laju erosi dan kepadatan tanah, pengolahan tanah intensif memerlukan biaya yang tinggi. Untuk mengatasi kerusakan karena pengolahan tanah, akhir-akhir ini diperkenalkan sistem olah tanah konservasi yang diikuti oleh pemberian mulsa yang diharapkan dapat meningkatkan produksi pertanian.

Istilah pengolahan tanah secara konvensional mengacu pada pengolahan tanah pada era ini, bukan pada era sebelumnya. Karakteristik pengolahan tanah pada era ini adalah,

- a) pengolahan tanah intensif (OTI), secara horizontal tanah yang diolah mencakup seluruh permukaan tanah, secara vertikal tanah yang diusik mencapai kedalaman 30 sampai 50 cm,
- b) alat yang digunakan adalah alat berat sehingga dapat memadatkan tanah
- c) laju dekomposisi bahan organik sangat tinggi sehingga terjadi pemiskinan karbon organik di satu pihak, dan di pihak lain pelepasan karbon dioksida menimbulkan efek rumah kaca.

Meskipun penelitian jangka pendek menunjukkan bahwa produksi tanaman merespon berpengaruh merugikan produksi tanaman karena kerusakan tanah yang ditimbulkannya. Pada umumnya pengolahan tanah dilakukan yaitu pengolahan tanah dengan penggemburan menggunakan excavator untuk membongkar tanah dengan kedalaman 50 sampai 100 cm.

2. Pengertian Surat Perintah Kerja

Surat Perintah Kerja merupakan surat resmi yang memberikan perintah kepada orang lain yang memuat hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh pekerja, mulai dari instruksi untuk memulai pekerjaan hingga kepastian waktu yang harus dilaksanakan oleh pekerja. Menurut (Dedi, Nurmaesah and Anggraeni, 2020) menyatakan "Surat Perintah Kerja (SPK) merupakan surat tugas yang diberikan oleh pihak pertama untuk pihak kedua dengan tujuan untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah ditentukan oleh pihak pertama".



Menurut (Afif and Dewi, 2020) menyatakan “surat perintah kerja merupakan surat dinas yang memerintahkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan yang tertera di dalam surat perintah tersebut”. Dari definisi yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa surat perintah kerja (SPK) merupakan surat tugas yang diberikan untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang telah ditentukan dengan tujuan menyelesaikan pekerjaan.

METODE

Kegiatan Magang Mandiri MBKM mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur di Distrik Rasau Kuning-Minas yang dimulai pada tanggal 26 Februari – 26 Juni 2024. Kegiatan magang dilaksanakan secara tatap muka (*offline*) di Kantor yang berlokasi di Mandi Angin, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Riau 28685. Hasil yang diharapkan dengan adanya kegiatan ini adalah dapat membantu dalam mencatat surat perintah untuk kegiatan pengelolaan lahan.

Kegiatan ini dimulai dari diskusi/wawancara dengan mentor dan koordinator lapang, yang kemudian melaksanakan langsung di lapang menggunakan bantuan aplikasi SAP. Adapun tahapan yang dilakukan adalah:

1. Persetujuan Perintah Kegiatan

Persetujuan Perintah Kegiatan merupakan proses formal di mana sebuah organisasi atau entitas memberikan persetujuan atau otorisasi resmi terhadap sebuah kegiatan atau proyek sebelum kegiatan tersebut dapat dimulai. Persetujuan ini merupakan langkah penting dalam manajemen proyek atau operasional, karena menunjukkan bahwa kegiatan tersebut telah dinilai, disetujui, dan dianggap layak untuk dilaksanakan. Sebelum pembuatan SPK, pengawas lapangan terlebih dahulu menuliskan nama petak & kegiatan yang akan dilakukan di kertas. Selanjutnya pengawas mengkonfirmasi ke Koordinator Lapangan untuk di tanda tangani. Setelah itu pengawas menyerahkan kertas tersebut ke bagian admin untuk melanjutkan pembuatan SPK.

2. Penginputan Data ke dalam aplikasi SAP

Adapun prosedur penginputan data ke dalam aplikasi SAP yaitu membuka funloc, memasukkan e-kode, masukkan nomor petak (contoh 077A01), masukkan jumlah luasan, kegiatan yang akan dilakukan, tanggal pengerjaan dan vendor yang akan bekerja. Lalu klik save.

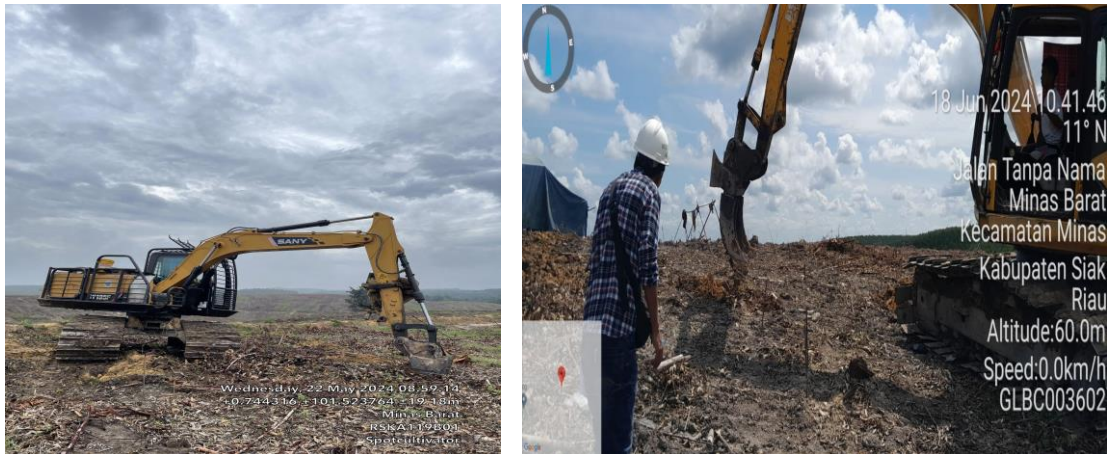
3. Penerbitan Surat Perintah Kerja

Setelah melakukan penginputan data ke dalam aplikasi SAP, Surat Perintah Kerja telah otomatis tersimpan dan dapat di print. Untuk ditandatangani ke pihak yang bersangkutan. mengawasi pelaksanaan pekerjaan untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis dan jangka waktu yang ditentukan. Pembayaran hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Manajemen Pengolahan Lahan

Distrik Rasau Kuning terletak di Mandi Angin, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Riau 28685. Luas Areal Distrik Rasau Kuning adalah 260.000 ha. Mekanisasi pengelolaan lahan adalah proses penggunaan teknologi dan sistem yang efektif untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam pengelolaan lahan. Mekanisasi pengelolaan lahan yang dapat membantu meningkatkan kesuburan tanah dan produktivitas lahan pada distrik Rasau Kuning dilakukan dengan penggunaan alat berat. Alat berat dapat membantu dalam proses pengolahan tanah, seperti pembajakan, penggemburan, dan pengangkatan tanah. Alat-alat ini dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam pengelolaan lahan. Alat yang digunakan adalah Excavator.



Gambar 1. Manajemen Pengelolaan Lahan

Sistem irigasi yang efektif dapat membantu dalam pengelolaan air tanah dan meningkatkan kesuburan tanah. Sistem irigasi dapat membantu dalam mengurangi kelebihan air dan mengoptimalkan penggunaan air tanah.



Gambar 2. Sistem Irigasi

Teknologi pengelolaan lahan yang efektif dapat membantu dalam pengelolaan lahan secara berkelanjutan. Teknologi yang digunakan adalah drone dapat membantu dalam pengawasan dan pengelolaan lahan secara lebih efektif



Gambar 3. Teknologi Pengelolaan Lahan dengan Drone

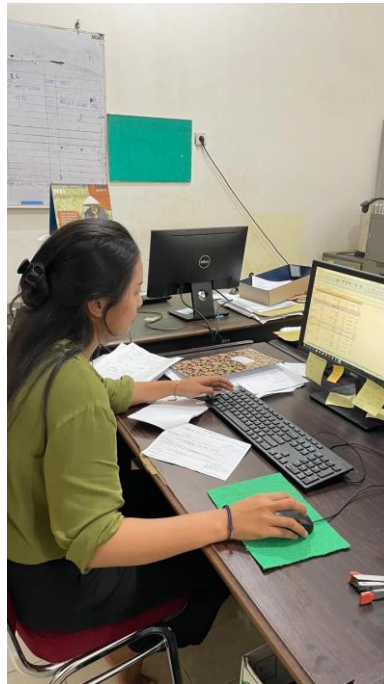
Dengan menggunakan teknologi dan sistem yang efektif, pengelolaan lahan dapat dilakukan secara lebih efisiensi dan produktif, sehingga meningkatkan kesuburan tanah dan produktivitas lahan.

2. Surat Perintah Kerja

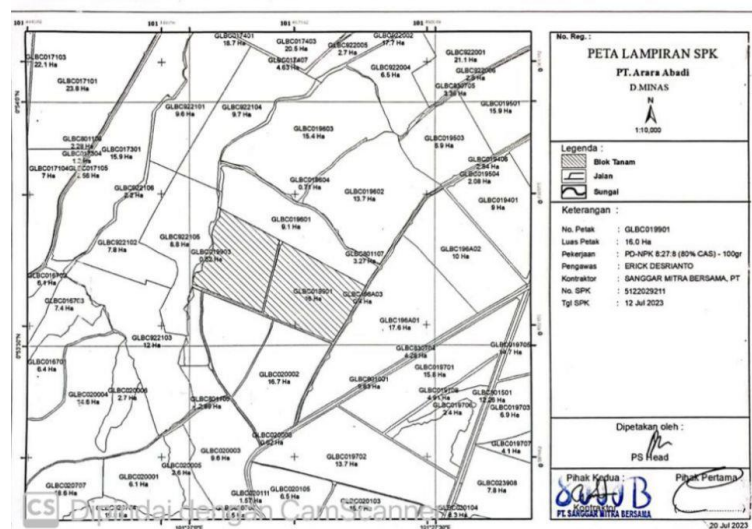
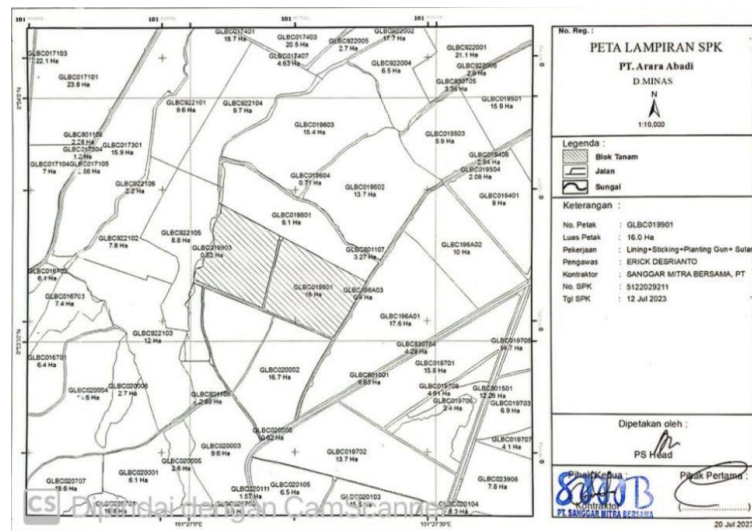
SPK adalah dokumen yang memuat keterangan terkait pemberian instruksi/perintah kepada pihak-pihak tertentu. Instruksi tersebut berhubungan dengan pemberian tugas atau pengerjaan proyek khusus yang berkaitan dengan aktivitas di suatu perusahaan. SPK bertujuan untuk memberikan perintah kerja yang jelas dan spesifik kepada pekerja, sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. SPK juga berfungsi sebagai dasar hukum untuk pelaksanaan pekerjaan dan sebagai acuan dalam penyelesaian perselisihan yang timbul.

Adapun hal-hal yang diperhatikan dalam pembuatan SPK adalah

- a. Luas lahan
- b. No Petak
- c. Daur (rotasi lahan yang sudah ditanam)
- d. Vendor/Perusahaan yang akan bekerja sama untuk mengerjakan petak.
- e. PK (Pengajuan Khusus) diajukan jika sebuah petak membutuhkan *maintenance* yang lebih
- f. Regime (seperangkat aturan kerja yang mengatur baik itu operasi maupun interaksi)
- g. Jenis kegiatan
- h. NIK Pengawas
- i. Tanggal pelaksanaan
- j. Jarak tanam
- k. Jenis tanaman
- l. Jenis lahan



Gambar 4. Dokumentasi Pembuatan SPK



Gambar 7. Peta Lampiran SPK

SIMPULAN

Manajemen pengelolaan lahan sebelum dijalankan memerlukan adanya perintah untuk terlaksananya suatu kegiatan. Dalam hal ini perintah yang diterapkan berupa Surat Perintah Kerja. Surat Perintah Kerja (SPK) adalah dokumen yang memuat keterangan terkait pemberian instruksi/perintah kepada pihak-pihak tertentu. Instruksi tersebut berhubungan dengan pemberian tugas atau pengerjaan proyek khusus yang berkaitan dengan aktivitas di suatu perusahaan. Tujuan SPK adalah untuk memberikan perintah kerja yang jelas dan spesifik kepada Penyedia, sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. SPK juga berfungsi sebagai dasar hukum untuk pelaksanaan pekerjaan dan sebagai acuan dalam penyelesaian perselisihan yang timbul.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Ibu Sri Widayanti, M.P selaku Dosen pembimbing magang mandiri, Bapak Dedy selaku Mentor BPPM, Bapak Rozi selaku Koordinator Lapang, dan seluruh pihak yang ikut serta dalam kegiatan magang mandiri yang telah menerima dengan baik dan memberikan kesempatan kepada saya untuk menambah ilmu dan memperluas wawasan dalam dunia kerja.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Agus Fahmudin dan Widiyanto, 2004. Petunjuk Praktik Konservasi Tanah Pertanian Lahan Kering. Bogor : *World Agroforestry Centre ICRAF Southeast Asia*
- Afif, A. and Dewi, C. N. P. (2020) “Sistem Informasi Kearsipan untuk Menunjang Pendataan Surat Internal Menggunakan Metode FAST pada Biro Kepegawaian Kementerian Pertahanan”, *Jurnal dinamika*, 1(2), pp. 234–246.
- Dedi, D., Nurmaesah, N. and Anggraeni, T. (2020) “Surat Perintah Kerja Proses Pesanan Furniture Berbasis Web pada PT Sarana Interindo Maju”, *Jurnal Sisfo Tek Global*, 10(2), pp. 3–8.
- Firdaus, A. (2024). *Model Pengelolaan Hutan Wakaf Bogor Berbasis Community Development Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Liptan. 1995. *Budidaya Ubi Kayu (Manihot esculenta Crantz)*. Balai Informasi Pertanian Irian Jaya. Jayapura.
- Wardiman, B., Fitriyani, E., Herliyani, S., Ashar, J. R., & Panga, N. J. (2024). *Pertanian Berkelanjutan*. TOHAR MEDIA.